



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berakhlak: Pelayanan Akutabdi/ampatan
berprestasi: loyal, disiplin, inovatif

PERUBAHAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Kota Pekalongan
**Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Pekalongan**



0285 425174



dindagkop.pekalongankota.go.id



Jl. Majapahit No.9 Kot

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop & UKM) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah berhasil disusun dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam kita panjatkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul hisab kelak.

Penyusunan Renja Perubahan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, dan telah disesuaikan juga dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan, disamping guna mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan. Usulan perubahan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan penyusunan perubahan Renja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dindagkop & UKM dan menyangkut keberhasilan dan pencapaian target. Penyusunan Perubahan Renja ini pada hakekatnya merupakan fundamental dalam sistem perencanaan daerah.

Diharapkan Perubahan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dindagkop & UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun-tahun yang akan datang.

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan disampaikan terima kasih.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi & UKM
Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review terhadap RKPD 2025	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV	59
PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel T.C 29 Hasil Evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	13
Tabel T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025.....	16
Tabel T.C 31 Review terhadap RKPD Tahun 2025	22
Tabel T.C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	42
Tabel T.C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra OPD.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Pasal 363 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Dalam Pasal 364 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3 Pasal 367 disebutkan sebagai berikut:

- (1) BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Renja ini disusun berdasarkan evaluasi perkembangan keadaan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Perkembangan sebagaimana dimaksud adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangkaan pendanaan, prioritas

dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan/atau keadaan darurat.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diakomodir terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Pekalongan yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2025 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Pekalongan Tahun 2025, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

- dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
 22. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 77);
 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
 26. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan anggaran 2025 Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Serta memberikan informasi kondisi riil dinas beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah melakukan evaluasi dan menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi-asumsi kerangka kegiatan sehingga

tercipta sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan;
- b) Program dan pagu indikatif yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan;
- c) Program dan pagu indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan;
- d) Penyesuaian anggaran kegiatan untuk memenuhi kebutuhan selama satu tahun sehingga anggaran lebih efisien, lebih efektif, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
- e) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga merupakan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar perencanaan program dan kegiatan mendatang sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat / kebutuhan dinas yang dinamis;
- f) Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Wali Kota Pekalongan Tahun 2025-2029;
- g) Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan.
- e) Sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan meliputi :

1. Bab I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. Bab IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dindagkop & UKM Kota Pekalongan selama tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 22.726.719.000,-, termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 urusan pemerintahan, 10 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.975.895.066,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 87,56% dan capaian kinerja keuangan sebesar 21,89% sehingga terjadi deviasi kinerja dan keuangan sebesar 4% lebih besar capaian kinerja dibanding realisasi keuangan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Triwulan I tahun 2025 pada Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dari 2 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan dengan 10 program, 18 kegiatan dan 35 sub kegiatan.

Adapun evaluasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 hasil/keluaran/program/kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada pelaksanaan Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan s.d triwulan I tahun 2025 terdapat 8 indikator program yang belum tercapai, dikarenakan kegiatan tersebut masih berlangsung.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan I 2025 terdapat 2 indikator program yang telah tercapai.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan I 2025 tidak terdapat capaian program/kegiatan yang melebihi target.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program/kegiatan sampai

dengan triwulan I tahun 2025 adalah dikarenakan program/kegiatan tersebut masih berlangsung.

Hasil evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

**Tabel T.C. 29 Hasil evaluasi Renja Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2025	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025 TW I			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	Persen	33.23	30.77	32.36	N/a	N/a	N/A	Belum Tercapai
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Persen	59.68	88.32	10.48	10.45	99.74	99.74	Belum Tercapai
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	Persen	12.37	25.56	12.27	0	208.34	208.34	Tercapai
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	Persen	77.70	86.86	76.93	45.44	59.06	59.06	Melebihi Target
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	100	75	100	68.75	68.75	68.75	Belum Tercapai

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2025	Presentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2025	Realisasi 2025 TW I			
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	Persen	100.00	100	100	100	100	100.00	Tercapai
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	Persen	8.19	7.50	7.99	0.86	10.76	10.76	Belum Tercapai
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	83.99	87.20	81.99	14.91	18.19	18.19	Belum Tercapai
9	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	Persen	7.50	2.05	6.42	0.01	0.01	0.15	Belum Tercapai
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100.01	100	29.45	29.45	29.45	Belum Tercapai
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100	16.10	16.10	16.10	Belum Tercapai
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	93.19	100	23.08	23.08	23.08	Belum Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2024 nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar 98,53 (A) atau predikat sangat baik. Hal tersebut dikarenakan peningkatan pelayanan Masyarakat yang antara lain; pelayanan perpanjangan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Pasar, pengajuan rekomendasai subsidi bahan bakar, pelayanan tera/ tera ulang, pembinaan UMKM dan koperasi dan pelayanan umum lainnya. Sedangkan nilai evaluasi AKIP Dindagkop & UKM Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 85,75 (A) dengan predikat memuaskan. Evaluasi AKIP menggambarkan efektivitas dan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dan capaian target kinerja dalam organisasi. Nilai 85,75 menunjukkan bahwa Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerjanya telah sesuai dengan arah, tujuan dan sasaran kinerja secara efektif dan efisien. Berbagai Upaya telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas antara lain;

- a. Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan dan Retribusi (Sitantri);
- b. Pengembangan Layanan Pengaduan Dindagkop dan UKM (Sapadaku);
- c. Optimalisasi E-kinerja dan E-presensi;
- d. Penggunaan Cascading dan pelaporan kinerja triwulan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat sebagaimana tabel Tabel.T.C.30.

Tabel T.C. 30 Pencapaian kinerja Pelayanan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan TW I Tahun 2025

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	TW I Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			76.78 indeks	77.08 indeks	77.38 indeks	77.68 indeks	88.69 Indeks	98.53 Indeks	N/a	77.38 indeks	
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor			2.83 persen	3.32 persen	4.55 persen	4.55 persen	5.13 persen	3.74 persen	N/a	4,55 persen	
3	Prosentase peningkatan nilai modal usaha dari koperasi			3,84 persen	3,69 persen	3,56 persen	3,44 persen	-6.06 persen	-13.72 persen	-0.69 Persen	3.44 persen	
4	Nilai Evaluasi AKIP			85.50 indeks	86.5 indeks	87.5 indeks	88.50 indeks	85.45 Indeks	85.75 Indeks	N/a	85.80 indeks	
5	Nilai Ekspor Perdagangan			26,71 Juta US\$	26,97 Juta US\$	27,24 Juta US\$	27,51 Juta US\$	11,09 Juta US\$	5,96 US\$	1.17 Juta US\$	27,24 Juta US\$	
6	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)			Rp.8,12 Trilyun	Rp.8,42 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	Rp.9,02 Trilyun	Rp.11,54 Trilyun	Rp. 10,23 Trilyun	Rp. 9.54 Trilyun	Rp.8,72 Trilyun	
7	Persentase koperasi berkualitas			30,94 persen	31,49 persen	32,36 persen	33,23 persen	29,70 persen	30.77 persen	N/a	32,36 persen	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	TW I Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
8	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota			58,31 persen	58,77 persen	59,22 persen	59,68 persen	97,20 persen	88.32 persen	10.45 persen	59,22 persen	
9	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha		√	12,06 persen	12,16 persen	12,27 persen	12,37 persen	23,09 persen	25.56 persen	0 persen	12,27 persen	
10	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko)		√	75,42 persen	76,17 persen	76,92 persen	77,70 persen	81,07 persen	86.86 persen	45.44 persen	76,92 persen	
11	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan diwilayah kerjanya			81,25 persen	93,75 persen	100 pesen	100 persen	68,75 persen	75,00 persen	68.75 persen	100 pesen	
12	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya			54,55 persen	72,73 persen	90,91 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	90,91 persen	
13	Persentase peningkatan volume ekspor			7,6 persen	7,79 persen	7,99 persen	8,19 persen	-0,04 persen	7.50 persen	0.86 persen	7,99 persen	

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	TW I Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
14	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		V	77,99 persen	79,99 persen	81,99 persen	83,99 persen	59,02 persen	87.20 persen	14.91 persen	81,99 persen	
15	Persentase ketercapaian jumlah UMKM yang difasilitasi pemasarannya		V	4,26 persen	5,24 persen	6,42 persen	7,5 persen	0,96 persen	2.05 persen	0.01 persen	6,42 persen	
16	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	29.45 persen	100 persen	
17	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	16.10 persen	100 persen	
18	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	23.08 persen	100 persen	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan adalah :

a. Koperasi dan UMKM

1. Lemahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM di bidang manajemen termasuk SDM, permodalan dan pemasaran.
2. Lemahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha.
3. Masih rendahnya tingkat keberlanjutan (eksistensi) dan ketahanan koperasi sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi
4. Isu kesetaraan gender dalam distribusi pendapatan menjadi permasalahan yang perlu digali penyelesaiannya ketika jumlah UMKM sektor kuliner yang ternyata memiliki peran dalam peningkatan ekonomi. Selain itu nilai modal usaha UMKM dari koperasi dan kontribusi peran gender dalam perkoperasian di Kota Pekalongan perlu digali dan dikembangkan.
5. Masih lemahnya daya saing kualitas produk UMKM di pasar domestik maupun global.
6. Koperasi Merah Putih pada Kelurahan perlu mendapatkan perhatian secara lebih intens karena merupakan program baru.
7. Belum optimalnya pelaksanaan ekonomi sirkuler pada level koperasi dan UMKM di Kota Pekalongan.

b. Perdagangan

1. Lemahnya koordinasi antara sektor produksi, transportasi dan jasa sehingga menghambat distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok terutama minyak goreng, cabe, kedelai yang berdampak pada tingkat laju inflasi harus dikendalikan dan dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan sektor serta langkah-langkah taktis pengendalian harga.
3. Kurang optimalnya pengembangan pasar dengan pola jejaring dan kemitraan antar pelaku usaha dalam pengembangan pasar dalam negeri.

4. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mikro terhadap peraturan perundangan perlindungan konsumen dan UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya).
5. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha produk unggulan untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan bisnis internasional.
6. Belum optimalnya pelaksanaan ekonomi sirkuler sektor perdagangan di Kota Pekalongan.

c. Pasar dan Pedagang Kaki Lima

1. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari sebagai icon dan pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan.
2. Masih kurang optimalnya pendapatan retribusi yang bersumber dari pasar Pedagang Kaki Lima dalam memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
3. Adanya Pedagang Kaki Lima yang masih melakukan aktivitas berjualan di badan jalan serta kurangnya kesadaran terhadap kebersihan, ketertiban dan keindahan.
4. Keberadaan pusat fashion dan kuliner Sugihwaras yang belum digunakan secara maksimal oleh Pedagang Kaki Lima.
5. Belum optimalnya pelaksanaan ekonomi sirkuler sektor perdagangan di Kota Pekalongan terutama pada Pasar Rakyat dan Pedagang Kaki Lima.
6. Pembangunan Kawasan Kuliner dan Ekonomi baru disekitar Alun-Alun Kota Pekalongan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan diperlukan perhatian lebih serius dalam penataan pedagang kaki lima disekitar Alun-Alun.

2.4. Review terhadap RKPD 2025

Dari Renja 2025 yang telah disusun oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja tahun 2025 terdapat penyesuaian pagu, program dan kegiatan. Penyesuaian Rancangan awal RKPD terhadap Renja tahun 2025 tersebut melihat urgensi dan target indikator kinerja organisasi. Pada RKPD Dindagkop & UKM Kota Pekalongan sebesar Rp. 22.726.719.000,- menjadi Rp.25.838.151.000,- yang terdapat dalam beberapa kegiatan-kegiatan. Penyesuaian pada Program antara lain; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Review terhadap RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T.C. 31

**Tabel.T-C.31. Review terhadap RKPD Tahun 2025
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan**

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>					<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>					
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,26 persen		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen		
1.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pekalongan	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	64,46 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.1.a	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	97.180.000,00	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	60 Unit Usaha	237.765.000,00	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen		
2.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,18 persen		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1,18 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.1.a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	14.600.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Pekalongan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	204 Orang	105.485.000,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen		
3.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 persen		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pekalongan	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4,85 persen		
3.1.a	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	183 Unit Usaha	898.520.000,00	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	183 Unit Usaha	865.910.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</u>					<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</u>					
4	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen		
4.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Pekalongan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
4.1.a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	4.530.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan	4 Dokumen	4.071.000,00	
4.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		
4.2.a	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1.800.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Dokumen	1.500.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen		
5.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,75 persen		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	18,75 persen		
5.1.a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2.750.000.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	4.945.872.000,00	
5.1.a	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.683.379.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	7.689.499.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
5.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 Persen		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	57,47 Persen		
5.2.a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	49.350.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	57.350.000,00	
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	90,91 persen		
6.1.a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan	96.740.000 ,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan	90.061.000,00	
6.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)			

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
6.2.a	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	6.220.000,00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	4.740.000,00	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen		
7.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir (SIDa)	26 Pelaku Usaha		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
7.1.a	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pekalongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	98.970.000,00	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Pekalongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	93.970.000,00	
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 Persen		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 Persen		
8.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 Persen		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pekalongan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	81,99 Persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
8.1.a	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5.164 Unit	254.112.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Pekalongan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.582 Unit	227.692.000,00	
8.1.b	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	24.910.000,00	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Pekalongan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 Orang	16.660.000,00	
9	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6.42 Persen		
9.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
9.1.a	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150 UMKM	872.330.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	150 UMKM	892.330.000,00	
9.1.b	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	96.750.000,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	80.258.000,00	
	Non Urusan					Non Urusan					
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
10.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		
10.1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.132.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.602.000,00	
10.1.b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.952.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.472.000,00	
10.1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	8.906.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
10.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		
10.2.a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.926.650.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	6.926.650.000,00	
10.2.b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	61.150.000,00	
10.2.c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.718.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.688.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
11.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		
11.1.a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.500.000,00	
11.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11.2.a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.093.000,00	
11.2.b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	196.011.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	264.756.000,00	
11.2.c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00	
11.2.d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850.000,00	
11.2.e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	67.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	59.350.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11.2.f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.830.000,000	
11.2.g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	272.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	265.176.000,00	
11.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		
11.3.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.500.000,00	

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
11.3.b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	979.300.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.721.300.000,00	
11.3.c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.935.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	511.960.000,00	
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah			
12.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		

No	RKPD Penetapan 2025					Hasil Analisis Kebutuhan (Perubahan RKPD 2025)					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
12.1.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	465.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	422.429.000,00	
12.1.b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	130.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	127.376.000,00	
12.1.c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	26.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	61 Unit	32.400.000,00	
JUMLAH				22.726.719.000,00		JUMLAH				25.838.151.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tahun 2025 diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan berupa pasar rakyat yang merupakan instrument penting dalam alur distribusi dalam pemenuhan stok dan pengendalian harga masyarakat. Terdapat beberapa usulan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan usulan masyarakat Kota Pekalongan pada perubahan RKPD tahun 2025. Adapun usulan masyarakat terkait pengembangan Usaha Mikro Kota Pekalongan antara lain:

- a. Bantuan Sarana Pemasaran berupa gerobak UMKM sebanyak 12 unit gerobak.
- b. Bantuan Pengembangan UMKM berupa mesin jahit sebanyak 5 unit.

Terdapat pula usulan masyarakat terkait dengan koperasi di Kota Pekalongan berupa Bantuan Hibah kepada Dekopinda Kota Pekalongan sebesar Rp. 50.000.000,-.

Usulan program dan kegiatan penelaahan masyarakat pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T.C-32.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME/ BESARAN	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				
	Bantuan Hibah kepada Dekopinda	Kota Pekalongan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Rp. 50.000.000,-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro				
	Bantuan Sarana Pemasaran Berupa Gerobak UMKM	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	12 UMKM	
	Bantuan Pengembangan UMKM berupa Mesin Jahit	Kota Pekalongan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	5 UMKM	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dindagkop & UKM Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025. Rencana kerja Dindagkop & UKM Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Dindagkop & UKM 2021-2026, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dindagkop & UKM Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Berpedoman juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 70 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan telah memanfaatkan SIPD dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangannya.

Kegiatan Dindagkop & UKM Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Bumi

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, Lain-lain PAD yang sah, Dana Bagi Hasil. Rencana Program, Kegiatan dan pendanaan dalam Renja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2025 dilakukan melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id> dan dapat dilihat sebagaimana dokumen terlampir.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN				25,878,236,000.00	DAU			17,998,138,000.00
2.17	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</u>				1,209,160,000.00	DAU, PBB			801,628,000.00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)		32,36 Persen	237,765,000.00	DAU		33,23 persen	129,512,000.00
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Kota Pekalongan	64,46 persen	237,765,000.00	DAU		65,29 persen	129,512,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Pekalongan	100 Unit Usaha	237,765,000.00	DAU		100 unit usaha	129,512,000.00
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		10,48 persen	105,485,000.00	DAU		59,68 Persen	29,200,000.00
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	Kota Pekalongan	1,18 persen	105,485,000.00	DAU		1,39 Persen	29,200,000.00
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Pekalongan	204 Orang	105,485,000.00	DAU Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		60 orang	29,200,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)		12,27 persen	865,910,000.00	DAU, PBB		12,37 persen	642,916,000.00
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	Kota Pekalongan	6,06 persen	865,910,000.00	DAU, PBB		7,26 persen	642,916,000.00
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Pekalongan	183 Unit Usaha	865,910,000.00	DAU, PBB		110 Unit Usaha	642,916,000.00
3.30	<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</u>				14,144,088,000.00	DBH, Retribusi Jasa Umum, DAU, Retribusi Jasa Usaha, Lain-lain PAD yang sah, PBB			6,769,812,000.00
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)		76,93 persen	5,571,000.00	DAU		77,70 Persen	3,000,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	Kota Pekalongan	100 persen	4,071,000.00	DAU		100 persen	2,000,000.00
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Pekalongan	4 Dokumen	4,071,000.00	DAU		8 Dokumen	2,000,000.00
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	Kota Pekalongan	100 persen	1,500,000.00	DAU		100 Persen	1,000,000.00
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kota Pekalongan	1 Dokumen	1,500,000.00	DAU		1 Dokumen	1,000,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		100 persen	12,692,721,000.00	DBH, Retribusi Jasa Umum, DAU, Retribusi Jasa Usaha, Lain-lain PAD yang sah		100 persen	5,969,665,000.00
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Kota Pekalongan	18,75 persen	12,635,371,000.00	DBH, Retribusi Jasa Umum, DAU, Retribusi Jasa Usaha, Lain-lain PAD yang sah		18,75 persen	5,919,665,000.00
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	1 Unit	4,945,872,000.00	DAU, Lain-lain PAD yang sah		1 Unit	100,000,000.00
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	12 Unit	7,689,499,000.00	DAU, DBH, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha		12 Unit	5,819,665,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	Kota Pekalongan	57,47 Persen	57,350,000.00	Retribusi Jasa Umum		68,97 persen	50,000,000.00
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	57,350,000.00	DAU		2 Dokumen	50,000,000.00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya		100 persen	94,801,000.00	DAU		100 persen	76,008,000.00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	Kota Pekalongan	90,91 persen	90,061,000.00	DAU		100 persen	72,008,000.00
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi	Kota Pekalongan	19 Laporan	90,061,000.00	DAU		19 Laporan	72,008,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten/Kota	Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	Kota Pekalongan	100 Persen	4,740,000.00	DAU		100 persen	4,000,000.00
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kota Pekalongan	3 Laporan	4,740,000.00	DAU		3 Dokumen	4,000,000.00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor		7,99 persen	93,970,000.00	DAU		8,19 persen	96,004,000.00
3.30.05.02.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir (SIDa)	Kota Pekalongan	26 Pelaku Usaha	93,970,000.00	DAU		27 Pelaku Usaha	96,004,000.00
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kota Pekalongan	30 Produk	93,970,000.00	DAU		30 UMKM	96,004,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)		81,99 Persen	244,352,000.00	DAU		83,99 persen	219,094,000.00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	Kota Pekalongan	81,99 Persen	227,692,000.00	DAU		83,99 persen	219,094,000.00
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Pekalongan	2.582 Unit	227,692,000.00	DAU		5.038 UTTP	194,094,000.00
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Pekalongan	50 Orang	16,660,000.00	DAU		85 Orang	25,000,000.00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)		6,42 Persen	1,012,673,000.00	DAU, PBB		7,50 persen	406,041,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	Kota Pekalongan	100 persen	972,588,000.00	DAU		100 persen	406,041,000.00
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	150 UMKM	892,330,000.00	DAU, PBB		160 UMKM	332,008,000.00
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kota Pekalongan	30 UMKM	80,258,000.00	DAU		55 UMKM	74,033,000.00
3.30.01	<u>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</u>				10,524,988,000.00	Retribusi Jasa Umum			10,426,698,000.00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	7,004,468,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	7,014,252,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	14,980,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	18,084,000.00
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 Dokumen	3,602,000.00	Retribusi Jasa Umum		3 Dokumen	3,132,000.00
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2,472,000.00	Retribusi Jasa Umum		2 Dokumen	2,952,000.00
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	8,906,000.00	Retribusi Jasa Umum		15 Laporan	12,000,000.00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	6,989,488,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	6,996,168,000.00
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	62 Orang/ Bulan	6,926,650,000.00	Retribusi Jasa Umum		62 Orang/Bulan	6,926,650,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 Dokumen	61,150,000.00	Retribusi Jasa Umum		12 Dokumen	67,800,000.00
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1,688,000.00	Retribusi Jasa Umum		1 Dokumen	1,718,000.00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	2,938,315,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	2,963,342,000.00
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	9,500,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	5,000,000.00
3.30.01.2.02.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	1 Paket	9,500,000.00	Retribusi Jasa Umum		2 Paket	5,000,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	693,055,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	432,560,000.00
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	7,093,000.00	Retribusi Jasa Umum		4 Paket	2,500,000.00
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	264,756,000.00	Retribusi Jasa Umum		4 Paket	49,000,000.00
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	8,000,000.00	Retribusi Jasa Umum		4 Paket	2,500,000.00
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	85,850,000.00	Retribusi Jasa Umum		4 Paket	54,320,000.00
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	13 Paket	59,350,000.00	Retribusi Jasa Umum		13 Paket	60,000,000.00
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Dokumen	2,830,000.00	Retribusi Jasa Umum		2 Dokumen	2,500,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	100 Laporan	265,176,000.00	Retribusi Jasa Umum		200 Laporan	261,740,000.00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	2,235,760,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	2,525,782,000.00
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	2,500,000.00	Retribusi Jasa Umum		4 Laporan	2,500,000.00
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	1,721,300,000.00	Retribusi Jasa Umum		12 Laporan	1,976,550,000.00
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	511,960,000.00	Retribusi Jasa Umum		12 Laporan	546,732,000.00
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Kota Pekalongan	100 persen	582,205,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 Persen	449,104,000.00

Kode	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 persen	582,205,000.00	Retribusi Jasa Umum		100 persen	449,104,000.00
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	39 Unit	422,429,000.00	Retribusi Jasa Umum		40 Unit	402,704,000.00
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Pekalongan	2 unit	127,376,000.00	Retribusi Jasa Umum		2 Unit	20,000,000.00
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	61 Unit	32,400,000.00	Retribusi Jasa Umum		45 Unit	26,400,000.00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan ini disusun guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan; mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*); dan sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekalongan. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan ini mengacu pada RPJM Pemerintah Daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026, sehingga perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun akan dapat berkelanjutan, konsisten dan berada pada kerangka acuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Perubahan Renja Dindagkop & UKM Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi & UKM
Kota Pekalongan



Drs. SUPRIONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19661008 199203 1 010